Rencana Aksi Akselerasi Pengarusutamaan Gender

DPMPTSP Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan sebuah peta jalan strategis yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis dan terukur, guna mencapai peringkat tertinggi dalam evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Menyadari peran unik DPMPTSP sebagai gerbang utama kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, laporan ini memposisikan dinas tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai katalisator strategis pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan gender.

Strategi yang diusulkan bertumpu pada empat pilar utama yang saling menguatkan: (1) **Transformasi Institusional**, yang berfokus pada penguatan fondasi kebijakan, sumber daya manusia, dan mekanisme internal PUG di dalam DPMPTSP; (2) **Integrasi Strategis**, yang mengamankan pelekatan perspektif gender ke dalam siklus inti perencanaan strategis (Renstra) dan penganggaran (PPRG) dinas; (3) **Inovasi Layanan**, yang mendorong perancangan ulang pelayanan publik untuk secara proaktif memfasilitasi dan memberdayakan wirausaha perempuan; serta (4) **Tata Kelola Berbasis Data**, yang membangun kapabilitas DPMPTSP sebagai pusat data terpilah gender di bidang ekonomi untuk menopang monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Implementasi dari keempat pilar ini akan memungkinkan DPMPTSP untuk tidak hanya memenuhi setiap indikator dalam formulir evaluasi APE secara substantif, tetapi juga untuk menunjukkan kepemimpinan dan inovasi. Target akhirnya adalah melampaui pemenuhan kepatuhan administratif dan secara nyata berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Bengkayang, yang pada gilirannya akan mengantarkan daerah meraih predikat "Utama" atau "Mentor" dalam Anugrah Parahita Ekapraya.

Bab 1: Pendahuluan - Memposisikan DPMPTSP sebagai Katalisator Pembangunan Responsif Gender di Bengkulu

1.1 Dekonstruksi Kerangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE): Sebuah Tinjauan Strategis

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan sebuah mekanisme evaluasi yang dirancang untuk mengukur komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Analisis mendalam terhadap formulir penilaian APE menunjukkan bahwa evaluasi ini tidak sekadar daftar periksa administratif, melainkan sebuah kerangka kerja holistik untuk mendorong perubahan sistemik. Penilaiannya mencakup tiga domain utama: pelebagaan PUG (regulasi, kelembagaan, SDM), integrasi PUG ke dalam tujuh tahapan siklus pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan), serta hasil nyata dari pembangunan yang responsif gender.

Struktur penilaian ini mengisyaratkan bahwa strategi untuk meraih nilai terbaik harus bersifat dua cabang. Pertama, memastikan kepatuhan terhadap indikator-indikator proses, seperti keberadaan peraturan daerah, surat keputusan, SDM terlatih, dan laporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik. Kedua, meluncurkan inisiatif-inisiatif yang menghasilkan dampak dan hasil yang terukur, seperti peningkatan partisipasi ekonomi perempuan atau penurunan kesenjangan akses terhadap sumber daya.

Lebih jauh, kerangka APE adalah sebuah evaluasi yang bersifat *whole-of-government* atau lintas sektoral. Keberhasilan sebuah dinas sangat bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya. Formulir APE secara eksplisit menanyakan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD—yang merupakan domain Bappeda—dengan Rencana Strategis (Renstra) di tingkat PD. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak dapat bergerak sendiri. Namun, posisinya yang unik sebagai gerbang utama bagi seluruh aktivitas ekonomi dan investasi memberikannya peran strategis dengan daya ungkit yang sangat tinggi.

1.2 Peran Unik dan Kritis DPMPTSP dalam Mendorong Kesenjangan Ekonomi

DPMPTSP memegang fungsi sebagai pusat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan berusaha dan fasilitasi penanaman modal. Fungsi ini menempatkan DPMPTSP pada titik persinggungan krusial antara kebijakan pemerintah dan realitas ekonomi di lapangan. Setiap wirausaha, baik laki-laki maupun perempuan, yang ingin meformalkan atau mengembangkan usahanya akan berinteraksi langsung dengan layanan yang disediakan oleh DPMPTSP. Kualitas, aksesibilitas, dan sensitivitas gender dari layanan ini menjadi faktor penentu utama apakah wirausaha perempuan mampu mengatasi berbagai hambatan untuk masuk dan berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal.

Peran sebagai "penjaga gerbang" ini dapat ditransformasikan. DPMPTSP tidak harus menjadi sekadar prosesor administrasi yang pasif. Sebaliknya, ia dapat menjadi motor

penggerak ekonomi yang proaktif sekaligus mesin data utama bagi seluruh kabupaten. Dengan menjalankan fungsi intinya melalui lensa gender, DPMPTSP dapat menciptakan sebuah siklus positif yang berkelanjutan. Layanan yang lebih baik dan inklusif akan menarik lebih banyak wirausaha perempuan untuk mendaftarkan usahanya. Proses pendaftaran ini menjadi momen krusial untuk mengumpulkan data terpilah gender yang akurat dan kaya. Data ini kemudian menjadi input vital bagi Bappeda dan PD lain untuk merancang program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif gender. Pada akhirnya, sinergi berbasis data ini akan mengangkat skor APE Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan. Rantai nilai ini dimulai dari satu titik krusial: loket pelayanan di DPMPTSP.

1.3 Dari Fungsi Administratif menjadi Penggerak Strategis: Visi Baru untuk DPMPTSP

Untuk memaksimalkan potensinya, DPMPTSP Kabupaten Bengkayang perlu mengadopsi sebuah visi baru yang melampaui tugas-tugas administratifnya. Visi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **"Menjadi katalisator terdepan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Bengkayang, serta diakui sebagai model nasional pelayanan publik yang responsif gender."**

Visi ini secara fundamental mengubah paradigma PUG. PUG tidak lagi dipandang sebagai beban kepatuhan atau kewajiban pelaporan semata, melainkan sebagai strategi inti untuk mencapai keunggulan layanan, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan visi ini, setiap inisiatif PUG yang diambil oleh DPMPTSP akan memiliki tujuan ganda: memenuhi kriteria APE dan secara bersamaan memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Bab 2: Pilar I - Transformasi Institusional: Membangun Fondasi Responsif Gender di DPMPTSP

Sebelum meluncurkan inovasi layanan eksternal, DPMPTSP harus terlebih dahulu membangun fondasi internal yang kokoh. Pilar ini berfokus pada penciptaan lingkungan kelembagaan yang mendukung, melegitimasi, dan menginternalisasi PUG ke dalam setiap aspek operasional dinas.

2.1 Penguatan Kerangka Kebijakan dan Regulasi Internal

Formulir evaluasi APE memberikan penekanan kuat pada keberadaan landasan hukum yang komprehensif sebagai bukti komitmen politik dan kelembagaan. Meskipun Kabupaten Bengkayang mungkin telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang PUG, DPMPTSP perlu menunjukkan komitmennya secara lebih spesifik melalui peraturan di tingkat dinas. Ini memberikan bukti konkret bahwa PUG telah diinstitutionalisasi hingga ke level operasional.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP:** Segera susun dan sahkan "SK Kepala Dinas tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha". SK ini akan menjadi payung hukum internal yang mengikat, menetapkan tujuan, menunjuk penanggung jawab, dan mengalokasikan sumber daya untuk PUG di lingkungan DPMPTSP.
2. **Mengembangkan Prosedur Operasional Standar (SOP) Responsif Gender:** Lakukan revisi terhadap SOP pelayanan yang ada atau buat SOP baru yang secara eksplisit responsif gender. Contohnya, SOP untuk staf di loket depan harus mencakup protokol pelayanan prioritas bagi kelompok rentan (ibu hamil, penyandang disabilitas, perempuan dengan anak kecil) dan cara berkomunikasi yang non-diskriminatif.
3. **Membuat SOP Analisis Gender dalam Evaluasi Proposal Investasi:** Untuk investasi skala menengah dan besar, kembangkan SOP yang mewajibkan tim analisis untuk melakukan kajian dampak gender. Analisis ini harus menilai potensi dampak diferensial dari sebuah proyek investasi terhadap laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, dampak terhadap lingkungan hidup yang menjadi sumber penghidupan perempuan, atau potensi konflik sosial terkait lahan.

2.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk PUG

Salah satu bagian paling detail dalam evaluasi APE adalah pendataan SDM terlatih PUG. Penilaian ini menuntut data jumlah dan persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan PUG, yang dirinci berdasarkan fungsi (perencana, teknis, evaluator, hukum) dan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah. Tuntutan ini mengindikasikan bahwa kapasitas PUG harus terdistribusi dan melekat pada fungsi teknis setiap dinas, bukan hanya terpusat di Pokja PUG kabupaten. DPMPTSP harus dapat menunjukkan kapasitas internal yang mandiri.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Pelatihan Berjenjang (Tiered Training):** Rancang program pelatihan PUG yang sistematis dan disesuaikan dengan peran masing-masing pegawai:
 - **Tingkat 1 (Staf Loker dan Layanan Pelanggan):** Pelatihan wajib mengenai Pelayanan Publik Prima yang Sensitif Gender, kesadaran bias bawah sadar, dan pemahaman kebutuhan spesifik wirausaha perempuan.
 - **Tingkat 2 (Staf Teknis, Analisis Perizinan, dan Tim Promosi Investasi):** Pelatihan mendalam mengenai alat analisis seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), serta cara mengintegrasikan indikator gender ke dalam sistem pemantauan investasi.
 - **Tingkat 3 (Pimpinan Eselon III dan IV):** Lokakarya strategis yang membahas hubungan antara PUG, percepatan pembangunan ekonomi daerah, dan strategi untuk memenangkan penghargaan APE.
2. **Dokumentasi dan Validasi:** Buat dan kelola sebuah basis data pelatihan yang cermat. Catat setiap kegiatan pelatihan, lengkap dengan daftar peserta (terpilah L/P), sertifikat, materi, dan dokumentasi foto. Data ini harus siap disajikan kapan pun saat proses verifikasi APE berlangsung.

2.3 Pembentukan Penggerak PUG Internal

Untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas implementasi PUG, diperlukan individu atau tim di dalam dinas yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal agenda ini. Formulir APE secara spesifik menanyakan keberadaan dan aktivitas *Gender Champions* dan *Focal Point* PUG, serta menuntut bukti berupa SK penunjukan dan laporan kegiatan.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Menunjuk *Gender Champion* DPMPTSP:** Tunjuk secara resmi seorang pejabat eselon III yang memiliki pengaruh dan kepedulian, misalnya Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, sebagai *Gender Champion*. Perannya adalah untuk mengadvokasikan PUG dalam forum-forum internal, serta mempromosikan iklim investasi yang ramah perempuan kepada para calon investor.
2. **Menetapkan *Focal Point* PUG DPMPTSP:** Tunjuk seorang staf teknis yang kompeten sebagai *Focal Point*. Tugas utamanya adalah menjadi koordinator teknis untuk PUG, bertanggung jawab atas pengumpulan data, penyusunan laporan, dan menjadi narahubung utama antara DPMPTSP dengan Pokja PUG Kabupaten.
3. **Legitimasi dan Pelaporan:** Pastikan kedua peran tersebut dilegitimasi melalui SK Kepala Dinas. Wajibkan mereka untuk menyusun laporan kegiatan triwulanan yang ringkas namun substantif, yang mendokumentasikan rapat koordinasi, inisiatif yang telah diambil, dan kemajuan yang dicapai. Laporan-laporan inilah yang akan menjadi bukti dukung utama untuk evaluasi APE.

Bab 3: Pilar II - Integrasi Strategis: Melekatkan Perspektif Gender dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran DPMPTSP

Pilar ini bertujuan untuk memindahkan PUG dari ranah program ad-hoc menjadi bagian integral dari mesin perencanaan dan penganggaran dinas. Integrasi ini adalah inti dari strategi pengarusutamaan, memastikan bahwa pertimbangan gender secara otomatis menjadi bagian dari setiap keputusan strategis dan alokasi sumber daya.

3.1 Perumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP yang Responsif Gender

Evaluasi APE secara cermat menelusuri alur logika perencanaan, dari dokumen tingkat kabupaten (RPJMD) hingga ke dokumen tingkat dinas (Renstra PD). Penilaian tidak hanya mencari kata "gender", tetapi juga memeriksa apakah substansi dan semangat kesetaraan gender termanifestasi dalam visi, misi, tujuan, strategi, program, dan yang terpenting, dalam indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Revisi Visi dan Misi:** Tinjau kembali visi dan misi DPMPTSP. Sisipkan frasa-frasa kunci yang mencerminkan komitmen terhadap inklusivitas, misalnya, "...mewujudkan iklim investasi yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender."
2. **Menambahkan Tujuan Strategis Spesifik Gender:** Buat setidaknya satu tujuan strategis (sasaran) yang secara eksplisit berfokus pada gender. Contoh: "Meningkatnya partisipasi dan daya saing wirausaha perempuan dalam perekonomian formal di Kabupaten Bengkayang."
3. **Transformasi Indikator Kinerja:** Ini adalah langkah paling krusial. Ubah indikator kinerja yang bersifat umum (gender-netral) menjadi indikator yang spesifik dan terpilah gender. Transformasi ini akan menjadi bukti paling kuat dari Renstra yang responsif gender.
 - **Indikator Lama:** "Jumlah izin usaha yang diterbitkan."
 - **Indikator Baru:** (1) "Jumlah izin usaha yang diterbitkan, terpilah berdasarkan jenis kelamin pemilik," dan (2) "Persentase peningkatan jumlah izin usaha yang diterbitkan untuk perempuan."
 - **Indikator Lama:** "Total nilai realisasi investasi."
 - **Indikator Baru:** (1) "Total nilai realisasi investasi," dan (2) "Total nilai realisasi investasi pada sektor-sektor usaha yang dominan menyerap tenaga kerja perempuan."

3.2 Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG): *Gender Budget Statement (GBS)*

PPRG, yang dibuktikan melalui adanya Anggaran Responsif Gender (ARG), merupakan salah satu komponen dengan bobot penilaian tinggi dalam APE.

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen analisis yang menjadi alat utama untuk merancang dan membenarkan ARG. GBS memaksa sebuah instansi untuk menganalisis secara kritis bagaimana alokasi anggarannya memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, serta merumuskan ulang kegiatan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Contoh nyata dari DPMPTSP Kota Surabaya menunjukkan bagaimana GBS dapat diterapkan secara praktis pada kegiatan dinas.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Pilih Program Percontohan:** Untuk tahun pertama, pilih satu atau dua program/kegiatan kunci dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPMPTSP untuk dibuatkan GBS. Program yang ideal adalah yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, seperti "Program Promosi Penanaman Modal" atau "Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal."
2. **Terapkan Proses 5 Langkah GBS:** Lakukan analisis mendalam dengan mengikuti kerangka kerja GBS:
 - **Langkah 1: Analisis Situasi:** Paparkan deskripsi program dan sajikan "Data Pembuka Wawasan" yang terpilah gender. Contoh: "Kegiatan seminar promosi investasi tahun lalu diikuti oleh 100 peserta, terdiri dari 80 laki-laki (80%) dan 20 perempuan (20%)."

- **Langkah 2: Analisis Kesenjangan Gender:** Gunakan kerangka AKSM (Akses, Kontrol, Partisipasi, Manfaat) untuk mengidentifikasi kesenjangan. Contoh: *Akses:* Informasi seminar tidak menjangkau jaringan wirausaha perempuan. *Partisipasi:* Tingkat partisipasi perempuan dalam seminar rendah. *Kontrol:* Perempuan tidak dilibatkan dalam menentukan topik seminar atau sektor yang dipromosikan. *Manfaat:* Sektor yang dipromosikan (misalnya, pertambangan) lebih banyak memberikan manfaat lapangan kerja bagi laki-laki.
- **Langkah 3: Identifikasi Akar Penyebab Kesenjangan:** Bedakan antara penyebab internal (yang bisa dikontrol dinas) dan eksternal. Contoh: *Internal:* Kanal promosi hanya menggunakan media umum, waktu seminar di malam hari tidak ramah bagi perempuan dengan tanggung jawab domestik. *Eksternal:* Rendahnya tingkat kepercayaan diri wirausaha perempuan, beban ganda, akses terbatas ke modal.
- **Langkah 4: Reformulasi Rencana Aksi dan Anggaran:** Berdasarkan analisis, usulkan perubahan konkret pada kegiatan dan alokasi anggarannya. Contoh: "Merealokasikan anggaran promosi sebesar Rp. X dari media umum ke kegiatan sosialisasi yang ditargetkan melalui organisasi perempuan (PKK, Koperasi Wanita). Mengubah waktu seminar menjadi jam kerja. Menambahkan sesi khusus 'Akses Permodalan bagi UMKM Milik Perempuan'."
- **Langkah 5: Kembangkan Indikator Kinerja Responsif Gender:** Buat indikator baru untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang telah direformulasi. Contoh: "Persentase peserta perempuan dalam seminar promosi investasi," atau "Jumlah wirausaha perempuan yang berhasil difasilitasi untuk mendapatkan akses pembiayaan."

Berikut adalah contoh tabel GBS yang dapat diadaptasi oleh DPMPTSP Bengkayang:

Tabel 1: Model Gender Budget Statement (GBS) untuk Program Promosi Penanaman Modal DPMPTSP

Komponen	Deskripsi
Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program Promosi Penanaman Modal
Analisis Situasi (Data Pembuka Wawasan)	- Data peserta seminar promosi tahun sebelumnya: 80% Laki-laki, 20% Perempuan. - Data sektor yang dipromosikan: 90% adalah sektor padat modal dan padat teknologi (dominasi laki-laki). - Data staf pelaksana kegiatan: 75% Laki-laki, 25% Perempuan.
Isu dan Faktor Kesenjangan Gender (AKSM)	Akses: Informasi promosi tidak efektif menjangkau jejaring usaha perempuan. Partisipasi: Rendahnya kehadiran dan partisipasi aktif perempuan dalam forum investasi. Kontrol: Perempuan tidak memiliki suara dalam penentuan sektor prioritas yang akan dipromosikan. Manfaat: Lapangan kerja dan peluang bisnis yang timbul dari investasi baru lebih banyak dinikmati oleh laki-laki.

Sebab Kesenjangan (Internal & Eksternal)	Internal: Kanal promosi konvensional (tidak menjangkau media spesifik perempuan), waktu acara tidak fleksibel, materi promosi tidak menyoroti peluang di sektor yang relevan bagi perempuan. Eksternal: Hambatan mobilitas, beban ganda (tanggung jawab domestik), akses terbatas ke modal dan jaringan bisnis formal.
Rencana Aksi dan Anggaran (Reformulasi)	- Aksi: Mengadakan sesi "Investment Outlook for Women Entrepreneurs"; Menjalin kemitraan diseminasi informasi dengan 5 organisasi perempuan. - Output: Meningkatnya jumlah wirausaha perempuan yang mendapatkan informasi peluang investasi yang relevan. - Anggaran: Mengalokasikan Rp. [jumlah] untuk kegiatan <i>outreach</i> dan kemitraan dengan organisasi perempuan dari total anggaran promosi.
Indikator Kinerja Responsif Gender	- Persentase peserta perempuan dalam seluruh kegiatan promosi investasi mencapai minimal 40%. - Jumlah nota kesepahaman (MoU) investasi yang berhasil ditandatangani di sektor padat karya perempuan (misalnya, pengolahan hasil pertanian, kerajinan, pariwisata).

Bab 4: Pilar III - Inovasi Layanan: Merancang Ulang PTSP sebagai Model Keunggulan Pelayanan Publik

Pilar ini berfokus pada tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya perempuan. Inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna tetapi juga menjadi bukti konkret dari implementasi PUG yang akan dinilai tinggi dalam APE.

4.1 Merancang Lingkungan Pelayanan yang Inklusif Gender

Lingkungan fisik kantor DPMPTSP memberikan pesan non-verbal yang kuat tentang prioritas dan nilai-nilai institusi. Fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya menunjukkan bahwa dinas tersebut peduli dan berkomitmen pada prinsip inklusivitas. Penyediaan fasilitas ini bukan sekadar tindakan sosial, melainkan langkah strategis untuk mengurangi "pajak waktu" dan hambatan logistik yang sering kali lebih berat ditanggung oleh perempuan.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Fasilitas Fisik:**
 - **Loket Prioritas:** Sediakan satu loket khusus yang ditandai dengan jelas sebagai "Loket Prioritas" bagi ibu hamil, ibu yang membawa balita, penyandang disabilitas, dan lansia.
 - **Ruang Laktasi Berstandar:** Bangun atau renovasi sebuah ruangan menjadi Ruang Laktasi yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan: ukuran

minimal 3x4 m², memiliki pintu yang dapat dikunci, ventilasi yang baik, wastafel dengan air mengalir, dan kursi yang nyaman. Fasilitas ini krusial bagi pegawai perempuan maupun pengunjung.

- **Pojok Bermain Anak:** Alokasikan area kecil yang aman dan dilengkapi dengan beberapa mainan sederhana sebagai tempat bermain anak. Fasilitas ini sangat membantu orang tua, terutama ibu, yang harus mengurus perizinan sambil membawa anak.
2. **Layanan Non-Fisik:**
- **Penyederhanaan Bahasa:** Tinjau semua formulir, brosur, dan materi informasi. Ganti jargon birokrasi yang rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
 - **"Jumat Jumpa Perempuan":** Adopsi inovasi dari Kubu Raya dan Banda Aceh dengan mendedikasikan hari Jumat sebagai hari layanan khusus perempuan. Pada hari ini, sediakan staf pendamping perempuan di loket khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pemohon perempuan yang mungkin merasa lebih leluasa berkonsultasi dengan sesama perempuan.

4.2 Fasilitas Proaktif untuk Wirausaha Perempuan

Untuk menjadi penggerak strategis, DPMPSTSP harus melampaui mandat tradisionalnya sebagai penerbit izin. Dengan mengambil peran proaktif dalam fasilitas bisnis, DPMPSTSP dapat menjadi pusat pengembangan wirausaha di daerah, sebuah inisiatif inovatif yang akan sangat dihargai dalam penilaian APE.

Langkah-Langkah Aksi (Inovasi Berdampak Tinggi):

1. **"Klinik Usaha Perempuan":** Sediakan layanan helpdesk mingguan yang didedikasikan untuk wirausaha perempuan. Klinik ini menawarkan konsultasi tatap muka mengenai proses pendaftaran NIB melalui OSS, pemahaman regulasi, penyusunan rencana bisnis sederhana, dan informasi mengenai perizinan lainnya.
2. **"Forum Akses Permodalan":** Selenggarakan acara triwulanan yang mempertemukan wirausaha perempuan dengan lembaga keuangan. Undang perwakilan dari perbankan (KUR), lembaga pembiayaan pemerintah (seperti PNM Mekaar, Pembiayaan UMi), dan modal ventura untuk mempresentasikan produk mereka dan membuka sesi konsultasi. DPMPSTSP berperan sebagai fasilitator dan jembatan.
3. **Program Mentorship "Perempuan Maju":** Jalin kemitraan strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bengkayang, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan asosiasi bisnis lainnya. Inisiasi program yang memasangkan wirausaha perempuan pemula dengan pengusaha perempuan senior yang sudah mapan sebagai mentor.

4.3 Mengembangkan Strategi Promosi Investasi yang Responsif Gender

Ini merupakan inovasi puncak bagi DPMPSTSP, di mana fungsi inti dinas—yakni menarik investasi—digunakan secara langsung untuk memajukan agenda kesetaraan gender.

Langkah ini mengubah PUG dari sekadar isu sosial menjadi sebuah proposisi ekonomi yang menarik dan kompetitif.

Langkah Aksi Strategis: Membuat "Peta Potensi Investasi Responsif Gender Kabupaten Bengkayang"

Peta investasi konvensional biasanya hanya menampilkan ketersediaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Peta yang responsif gender menambahkan lapisan data sosio-ekonomi untuk menyoroti peluang investasi yang secara inheren memberdayakan perempuan dan selaras dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang semakin diminati investor.

Proses pembuatannya melibatkan:

1. **Kolaborasi Data:** Bekerja sama dengan dinas yang menangani Koperasi & UMKM dan dinas teknis lainnya untuk memetakan kluster-kluster usaha yang didominasi oleh perempuan (misalnya, pengolahan kopi, kerajinan anyaman, kuliner lokal, ekowisata berbasis komunitas).
2. **Analisis Rantai Nilai:** Untuk setiap kluster, lakukan analisis rantai nilai sederhana untuk mengidentifikasi titik-titik lemah atau peluang intervensi. Contoh: kluster pengolah keripik singkong mungkin kekurangan fasilitas pengemasan modern; kluster penenun kain tradisional mungkin membutuhkan akses ke bahan baku berkualitas atau platform pemasaran digital.
3. **Framing Peluang Investasi:** Ubah setiap titik lemah tersebut menjadi sebuah "paket peluang investasi" yang konkret. Contoh: "Peluang investasi pembangunan fasilitas pengemasan dan pengeringan komunal untuk 50 UMKM keripik yang dikelola perempuan dengan potensi pasar X," atau "Peluang investasi dalam platform e-commerce dan pelatihan digital marketing untuk 100 perajin tenun."
4. **Publikasi dan Promosi:** Terbitkan peta ini dalam bentuk brosur, prospectus digital, dan laman khusus di situs web DPMPTSP. Promosikan secara aktif kepada investor yang memiliki mandat investasi berdampak (impact investing) atau ESG. Langkah ini akan memposisikan Kabupaten Bengkayang sebagai destinasi investasi yang progresif dan bertanggung jawab secara sosial.

Bab 5: Pilar IV - Tata Kelola Berbasis Data: Memanfaatkan Data untuk Monitoring, Evaluasi, dan Perumusan Kebijakan

Pilar terakhir ini adalah fondasi dari akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Tanpa data yang akurat dan terpilah, semua upaya PUG akan sulit diukur dan dibuktikan. DPMPTSP, sebagai titik awal registrasi usaha, memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi sumber data ekonomi terpilah gender yang paling andal di kabupaten.

5.1 Membangun Sistem Data Terpilah Gender (Data Terpilah)

Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin adalah prasyarat mutlak untuk dapat melakukan analisis gender, perencanaan, dan evaluasi yang kredibel. Peraturan yang ada telah memberikan panduan detail mengenai jenis data apa saja yang perlu dikumpulkan untuk sektor UMKM, termasuk data pemilik usaha dan penerima manfaat program.

Langkah-Langkah Aksi:

1. **Integrasi ke dalam Sistem:** Jadikan kolom "jenis kelamin pemilik usaha" sebagai isian wajib (*mandatory field*) dalam setiap formulir perizinan, baik yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) maupun perizinan lokal lainnya.
2. **Standarisasi dan Pelatihan:** Latih staf yang bertugas melakukan entri data untuk memastikan konsistensi dan akurasi pengisian.
3. **Pengelolaan Basis Data:** Tetapkan protokol untuk melakukan ekstraksi, pembersihan, dan analisis data dari sistem OSS secara berkala (misalnya, triwulanan). Bangun sebuah basis data induk wirausaha di Bengkayang yang dapat dipilah berdasarkan jenis kelamin, sektor usaha, skala (mikro, kecil, menengah), dan lokasi (kecamatan/desa).
4. **Diseminasi Informasi:** Manfaatkan data yang terkumpul dengan menerbitkan laporan tahunan berjudul "**Profil Kewirausahaan Responsif Gender Kabupaten Bengkayang**". Publikasi ini akan sangat berguna bagi Bappeda, PD lain, akademisi, dan masyarakat umum, sekaligus menjadi bukti kuat untuk APE.

5.2 Monitoring dan Evaluasi Implementasi PUG

Formulir APE menuntut bukti adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi PUG yang dilakukan secara berkala (triwulanan, semesteran, atau tahunan), serta bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Untuk memenuhi tuntutan ini, DPMPTSP memerlukan sebuah sistem monitoring dan evaluasi (M&E) internal yang terstruktur dengan indikator kinerja yang jelas. Dasbor kinerja adalah alat manajemen paling efektif untuk tujuan ini.

Tabel 2: Dasbor Indikator Kinerja Utama (KPI) Implementasi PUG di DPMPTSP

Tabel berikut menyajikan contoh dasbor KPI yang dapat digunakan oleh pimpinan DPMPTSP untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan membuat keputusan berbasis bukti. Dasbor ini juga berfungsi sebagai sumber data utama untuk pengisian formulir APE.

Pilar Strategis	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Baseline (Tahun 0)	Target (Tahun 1)	Sumber Data
I. Institusional	% staf DPMPTSP (berdasarkan peran) yang terlatih PUG	10%	75%	Catatan Pelatihan Kepegawaian
	Laporan aktivitas <i>Gender Champion & Focal Point</i> diserahkan triwulanan	0	4 Laporan	Arsip Persuratan Dinas

II. Strategis	Jumlah program yang memiliki dokumen GBS lengkap	0	2 Program	Bidang Perencanaan
	% indikator kinerja dalam Renstra yang terpilah gender	5%	50%	Dokumen Renstra DPMPTSP
III. Inovasi Layanan	Skor kepuasan pengguna layanan (Perempuan vs. Laki-laki)	P: 3.5/5, L: 4.0/5	P: 4.2/5, L: 4.2/5	Survei Kepuasan Masyarakat
	% peningkatan jumlah NIB yang diterbitkan untuk perempuan	-	15%	Basis Data OSS
	Jumlah wirausaha perempuan yang terlayani melalui "Klinik Usaha"	0	100 orang	Buku Log Program
IV. Tata Kelola Data	% pendaftaran usaha baru dengan data gender yang lengkap	40%	98%	Basis Data OSS
	Publikasi "Profil Kewirausahaan Responsif Gender" tahunan	Tidak	Ya	Bidang Data dan Informasi

Bab 6: Kesimpulan dan Peta Jalan Akselerasi Implementasi

6.1 Sintesis Empat Pilar menjadi Strategi Kohesif

Keempat pilar yang diuraikan dalam laporan ini—Transformasi Institusional, Integrasi Strategis, Inovasi Layanan, dan Tata Kelola Berbasis Data—dirancang untuk bekerja secara sinergis dan saling menguatkan. Kapasitas institusional yang dibangun pada Pilar I menjadi fondasi yang memungkinkan perencanaan strategis yang cermat pada Pilar II. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kemudian memberikan arah dan sumber daya bagi inovasi layanan yang berdampak pada Pilar III. Akhirnya, seluruh kemajuan dari pilar-pilar tersebut diukur, dipantau, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui sistem data yang andal pada Pilar IV. Rangkaian ini menciptakan sebuah siklus perbaikan yang sistematis dan terukur.

6.2 Rencana Implementasi Bertahap

Untuk memastikan implementasi yang realistis dan efektif, strategi ini dipecah ke dalam tiga fase dengan target waktu yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan DPMPTSP untuk membangun momentum, menunjukkan keberhasilan awal (*quick wins*), dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas dan skala intervensi.

- **Fase 1: Kemenangan Cepat (0-6 Bulan)**
 - Menunjuk secara resmi *Gender Champion & Focal Point* PUG internal melalui SK.
 - Membangun Loker Prioritas dan memperbaiki penanda/rambu yang ramah gender.
 - Melaksanakan Pelatihan Tingkat 1 untuk seluruh staf layanan terdepan.
 - Memulai penerapan protokol pengumpulan data gender yang lengkap dari sistem OSS.
- **Fase 2: Pembangunan Fondasi (6-18 Bulan)**
 - Menyusun dan mengesahkan SK Kepala Dinas tentang PUG dan SOP Responsif Gender.
 - Melaksanakan Pelatihan Tingkat 2 dan 3 untuk staf teknis dan pimpinan.
 - Mengembangkan dan mengujicobakan GBS pertama untuk satu program unggulan.
 - Meluncurkan layanan "Klinik Usaha Perempuan".
 - Membangun Ruang Laktasi sesuai standar Kementerian Kesehatan.
- **Fase 3: Kepemimpinan Strategis (18-36 Bulan)**
 - Melakukan revisi menyeluruh terhadap Renstra DPMPTSP untuk mengintegrasikan KPI responsif gender.
 - Menerbitkan edisi pertama "Peta Potensi Investasi Responsif Gender".
 - Menerbitkan edisi pertama "Profil Kewirausahaan Responsif Gender Kabupaten Bengkayang".
 - Memperluas penerapan GBS untuk mencakup seluruh program utama dinas.

Sebagai panduan praktis akhir, tabel berikut ini secara langsung memetakan setiap tindakan yang direkomendasikan dalam laporan ini ke indikator spesifik pada formulir evaluasi APE. Tabel ini dapat berfungsi sebagai daftar periksa utama bagi tim DPMPTSP dalam mempersiapkan dokumen dan bukti dukung untuk penilaian.

Tabel 3: Rencana Aksi DPMPTSP yang Dipetakan pada Indikator Evaluasi APE

Aksi yang Direkomendasikan (dari Laporan Ini)	Indikator APE yang Relevan & Halaman	Bukti Dukung yang Harus Disiapkan
Menerbitkan SK Kepala Dinas tentang PUG	1.1 (Regulasi/Kebijakan) - Hal. 1	Salinan SK yang telah ditandatangani dan diberi nomor.
Melaksanakan Pelatihan Berjenjang (Tingkat 1, 2, 3)	2.1 (SDM Terlatih) - Hal. 2	Basis data pelatihan, sertifikat, kurikulum, dokumentasi foto.
Meluncurkan "Klinik Usaha Perempuan"	III.6.2 (Partisipasi Masyarakat - Dunia Usaha) - Hal. 20	Laporan pelaksanaan program, foto kegiatan, daftar penerima manfaat (terpilah L/P).
Mengembangkan GBS untuk Program Promosi Investasi	II.b.2.4 & 2.5 (ARG) - Hal. 15	Dokumen GBS yang telah diisi dan dianalisis secara lengkap.

Menerbitkan "Peta Potensi Investasi Responsif Gender"	II.a.2.3 (Substansi Gender dalam Renstra PD) - Hal. 11	Peta/prospektus yang telah dipublikasikan (cetak/digital).
Membangun Dasbor KPI untuk Monitoring PUG	II.d.1.2 (Pelaksanaan Pemantauan secara Berkala) - Hal. 25	Laporan dasbor triwulanan, notulensi rapat yang membahas hasil dasbor.
Menyediakan Ruang Laktasi Berstandar	III.10 (Penyediaan Fasilitas Ramah Perempuan di Kantor)	Foto fasilitas, SK tentang penetapan ruang laktasi.
Menerbitkan "Profil Kewirausahaan Responsif Gender"	I.4 (Ketersediaan Data Terpilah)	Dokumen publikasi profil kewirausahaan.